



"Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya"

ISSN 2579-9924 (Online)

ISSN 2579-9878 (Cetak)

Volume 4 No.1 Maret 2020

Halaman 301-311

Filsafat Progresivisme dan Implikasinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai *General Education* di Indonesia

Bakti Fatwa Anbiya

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
baktifatwaanbiya@walisongo.ac.id

Encep Syarif Nurdin

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
encep.sn@upi.edu

Ahmad Syamsu Rizal

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
rizal@upi.edu

Abstract

As a stream of modern philosophy, the flow of progressivism requires radical change by emphasizing the competence of students through learning experiences, the ability to manage themselves and personal changes that have an impact on students' appreciation and creativity. In the pursuit of Citizenship Education in higher education as General Education has a very determinant role, it is coherent with the development of citizens' competencies. The development in question is the Civic Knowledge, Civic Skill and Civic Disposition (Character of Citizenship) which are developed so that they become superior citizens in order to achieve the goals of Education.

Keywords: Philosophy of Progressism, Citizenship Education, General Education

Abstrak

Sebagai aliran filsafat modern, aliran progresivisme mengkehendaki adanya perubahan yang radikal dengan menekankan kompetensi peserta didik melalui pengalaman belajar, kemampuan mengelola diri serta perubahan secara pribadi yang memberi dampak apresiasi dan kreatifitas peserta didik. Dalam pembejaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai General Education memiliki peran yang sangat determinan, hal tersebut berkoherensi dengan pengembangan kompetensi warganegara. Pengembangan yang dimaksud adalah Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan), Civic Skill (Kecakapan Kewarganegaraan), dan Civic Disposition (Watak Warganegara) yang dikembangkan sehingga menjadi warga negara unggul dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan.

Kata Kunci: Filsafat Progresifisme, Pendidikan Kewarganegaraan, Generan Education



I. Pendahuluan

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki orientasi utama yakni mengembangkan kompetensi Kewarganegaraan. Urgensi peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sejalan dengan demokratisasi. Partisipasi yang bermutu yang bertanggung jawab pada kehidupan politik baik dalam tataran lokal, nasional maupun global merupakan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Partisipasi yang berkualitas setidaknya memerlukan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi: 1) penguasaan dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu; 2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; 3) pengembangan sikap serta karakter; 4) komitmen yang benar terhadap nilai demokrasi konstitusional (Branson, 1999, pp. 8-9).

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen. Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 menyatakan bahwa Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang mempunyai daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki landasan filosofis yang kuat sebagai pijakan epistemologis. Dalam filsafat pendidikan modern dikenal aliran-aliran filsafat seperti esensialisme, progresivisme, pragmatisme, humanisme, rekonstruktivisme, eksistensialisme, dan perennialisme (Jalaludin & Idi, 2012, p. 84). Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan aliran Filsafat Progresivisme memiliki pengaruh sebagai landasan filosofis sebagaimana yang di jelaskan oleh Winataputra (2014): Pendidikan Kewarganegaraan secara holistik memiliki tujuan agar setiap warga negara muda (*young citizen*) memiliki rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan dalam konteks nilai dan moral Pancasila, Nilai dan Moral Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar kehidupan demokrasi secara utuh yakni belajar tentang demokrasi (*learnig about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning thouht democracy*), dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*).

Filsafat Progresivisme mengarahkan peserta didik untuk terus maju dan berkembang dalam rangka mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Filsafat Progresifivisme menuntut untuk selalu maju (progres) bertindak konstruktif, reformatif, aktif, inovatif serta dinamis. Hal tersebut senada dengan apa yang dijelaskan Branson dalam (Budimansyah & Winataputra, 2007) mengenai kompetensi kewarganegaraan yang holistik meliputi 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) meliputi penguasaan dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu; 2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris dan demokratis, 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) pengembangan sikap serta karakter, baik itu karakter publik maupun karakter privat yang harus mampu di kembangkan oleh peserta didik.

Watak Kewarganegaraan tidak akan terbentuk jika pemilihan pendekatan serta model pembelajaran yang tidak dilandasi secara progresif dan konstruktivistik. Maka pendidikan Kewarganegaraan akan kembali terjebak pada landasan filosofis perennialis dan idroktinisasi seperti yang terjadi pada era orde baru.



Berdasarkan latar belakang diatas, pembahasan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah Filsafat progresivisme dan implikasinya terhadap Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *General Education* di Perguruan Tinggi.

II. Metode Penelitian

Dalam mengkaji filsafat progresivisme dan implikasinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *General Education*, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* guna mengumpulkan temuan dan data-data terkait tema yang penulis analisis, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab beberapa masalah yang di kaji (Nazir, 2003, p. 27).

Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang didapatkan peneliti melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, sedangkan analisis data peneliti gunakan adalah reduksi data, pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan kemudian dikurangi untuk diambil data-data yang penting yang diperlukan karena berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini; display data dan verifikasi, pada tahapan ini data-data yang diperlukan yang telah diambil kemudian disajikan sekaligus dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang paling diperlukan dalam pembahasan permasalahan pada penelitian; dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014, p. 14).

III. Pembahasan

A. Konsep Filsafat Progresivisme

Dalam mendiskusikan Filsafat Progresivisme, hendaklah memahami lebih jauh pandangan atau ajaran filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme dikelompokkan sebagai mazhab yang bersikap anti otoritarianisme dan absolutisme baik kuno maupun modern, meliputi semua bidang kehidupan, agama, moral, politik, dan ilmu pengetahuan (Ibrahim, 2018, p. 51). Progresivisme meyakini kemampuan peserta didik memiliki alamiah, *self-regeneratif*, untuk menghadapi problematikan hidupnya. Progresivisme memandang pendidikan bukan hanya mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik saja, akan tetapi dengan pendidikan diharapkan peserta didik dapat memahami dan memprediksi kehidupan di masa yang akan datang.

Filsafat Progresivisme berpandangan bahwa pendidikan adalah sebagai upaya terencana untuk membantu tumbuh dan kembangnya peserta didik (Barnadib, 2000, p. 97). Parameter kualitas dari proses pembelajaran dapat diamati dari kualitas peserta didik sebagai *output* proses pendidikan.

Sebagai suatu aliran dalam filsafat, filsafat progresivisme hadir sebagai reaksi terhadap pola-pola pendidikan tradisional yang menitik beratkan pada metode-metode formal, belajar mental (Kejiwaan), dan sastra kelasik peradaban barat. Filsafat pendidikan progresivisme mendukung gerakan baru yang di pandang lebih baik bagi perkembangan pendidikan dimasa yang akan datang. Filsafat progresivisme mendorong peserta didik untuk, kreatif, inovatif, produktif dan progresif. Untuk mendapatkan perubahan peserta didik harus memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada ansir-ansir fleksibel yang artinya tidak kaku, tidak anti perubahan tidal terikat pada doktrin-doktrin tertentu, toleran dalam artian menerima keberagaman.

Filsafat progresivisme memiliki dua sifat yang mendasar untuk mendapatkan perubahan, di antaranya: 1) sifat negatif, dalam arti bahwa progresivisme menolak



otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk seperti misalnya dalam agama, etika, politik dan epistemologi; 2) sifat positif, dalam arti filsafat progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia yang diwarisi sejak lahir manusia natural power (Salu & Triyanto, 2017, p. 30).

Filsafat Progresivisme telah memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan, dengan meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan peserta didik, baik secara fisik maupun dalam ranah berfikir, oleh karena itu filsafat progresivisme tidak menghendaki pembelajaran yang otoriter dan indoktrinasi. Dalam istilah yang diadopsi oleh Mendikbud RI Nadiem Makarim sebagai kemerdekaan belajar (Kemendikbud, 2019).

B. Proses Pembelajaran dalam pandangan Filsafat Progresivisme

Pembelajaran pada hakikatnya adalah upaya untuk menuntun peserta didik kedalam kegiatan belajar sehingga dapat memperoleh hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran, tenaga pendidik (guru baik dosen) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan capaian pembelajaran. (Sardiman, 2003) menguraikan "belajar merupakan perubahan penampilan atau tingkah laku, dengan runtutan kegiatan misalnya dengan mengamati, membaca, mendengarkan, serta meniru".

Pembelajaran haruslah menghasilkan corak dari *output* (luaran) sebagai hasil proses pendidikan. Peserta didik sebagai output dari proses pendidikan diharapkan menghasilkan peserta didik yang unggul, kompetitif, inovatif, dan kreatif sehingga terbentuk peserta didik/warganegara yang memiliki watak yang holistik. Maka dari itu diperlukan seperangkat kurikulum yang berpusat pada pengalaman.

Sebagaimana dijelaskan oleh Salu dan Triyanto (2017), proses pembelajaran dalam filsafat progresivisme sekurang-kurangnya memuat:

1. Guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus memberikan dampak meningkatnya minat belajar dan rasa ingin tahu siswa/mahasiswa. Setiap pembelajaran dalam aliran progresivisme diupayakan untuk membuka ruang berfikir siswa serta di dorong untuk melakukan penemuan – penemuan baru sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kreasinya.
2. Berinteraksi dengan alam, merupakan kegiatan membuat siswa/mahasiswa guna mengenal lingkungannya
3. Kreativitas guru dalam merumuskan langkah langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan dan model yang menarik perhatian siswa/mahasiswa.
4. Siswa/mahasiswa didorong untuk berinteraksi dengan sesama siswa/mahasiswa guna menjalin kerjasama .
5. Kurikulum menekankan studi alam terhadap perkembangan baru dalam saintifik dan sosial.
6. Pendidikan sebagai proses yang terus menerus bukan sekedar menyiapkan kehidupan dewasa.

Zuhairini menjelaskan dalam (Jalaludin & Idi, 2012, p. 88) Dalam aliran progresivisme, para pendidik menentang praktik – praktik pembelajaran otoritarianisme, berpusat pada buku teks, pembelajaran pasif dengan metode menghafal, filsafat empat tembok dengan mengeyampingkan kehidupan nyata, penggunaan ancaman untuk menimbulkan rasa takut siswa. Tanpa pemberian kesempatan yang luar biasa untuk bereksplorasi, peserta didik akan mengalami hambatan dan kesulitan dalam



mengembangkan kreatifitasnya. Kreatifitas bisa di capai oleh peserta didik bila di berikan ruang dan kesempatan untuk berkembang secara mandiri potensi yang ada dalam dirinya.

Dewey (1950) menegaskan bahwa pendidikan adalah *"preparing or getting ready for some future duty or privilege"*. Lanjut Dewey (1963) menjelaskan *"the notion that education is a unfolding from within appears to have more likeness to the conception of growth which has been set forth"*. Dalam Konteks ini Pendidikan berfungsi memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyiapkan masa depannya.

Dalam mempersiapkan peserta didik yang mandiri kreatif serta inovatif maka di pandang perlu (Jalaludin & Idi, 2012, p. 93) :

1. Memberikan kesempatan peserta didik belajar perorangan
2. Memberikan kesempatan pada peserta didik belajar dari pengalaman
3. Memberikan motivasi bukan perintah
4. Mengikut sertakan peserta didik dalam setiap kegiatan karena merupakan kebutuhan pokok anak
5. Menyadarkan peserta didik bahwa hidup itu dinamis, peserta didik harus selalu di hadapkan pada dunia yang selalu berubah dengan kemerdekaan beraktifitas dengan orientasi kehidupan masa kini.

Oleh sebab itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong kemerdekaan belajar peserta didik, karena guru memilih peran sebagai fasilitator dan inspirator yang mengarahkan pembelajaran berpusat pada peserta didik sebagai subjek bukan objek.

C. Filsafat Progresivisme Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai *General Education*

Filsafat Progresivisme memandang pendidikan sebagai suatu sarana atau alat untuk mempersiapkan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik agar tetap survive terhadap semua tantangan kehidupan yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan (Muhmidayeli, 2011, p. 156). Proses pendidikan harus memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik, terutama dalam menghadapi persoalan yang ada di masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan berupaya dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki watak kewarganegaraan yang holistik serta progresif yang mampu mengelola diri agar bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam mempersiapkan warganegara. Pendidikan Kewarganegaraan beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur selama enam dekade sejak pertama kali di kenalkan sebagai bidang studi pada tahun 1947.

Konsep Kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Kurikulum sebagai program yang disediakan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan (Majid, 2014, p. 1). Perkembangan dan pertumbuhan kurikulum dalam sistem pendidikan mempunyai sifat dinamis, sehingga dalam perumusannya dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan pada masa kurikulum di implementasikan.

Hal tersebut terjadi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang di antaranya istilah *Civics* yang secara formal tidak ditemukan dalam kurikulum 1957



maupun kurikulum tahun 1946. Akan tetapi secara material dalam kurikulum SMP tahun 1957 terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran Pengetahuan Umum yang didalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan (Winataputra, 2012, p. 3).

Pada kurikulum SMA tahun 1962 Pendidikan kewarganegaraan di kenal sebagai program kulikuler sebagai mata pelajaran *civics* yang berisikan materi tentang pemerintah Indonesia Yang berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (Winataputra, 2012, p. 3). (Somantri, 1969, p. 7) menjelaskan pada saat itu matapelajaran *Civics* atau kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang di gali dan di pilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato presiden, deklarasi Hak Asasi Manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Dapat disimpulkan bahwa konten materi Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum 1962 berpusat pada penguasaan materi bukan pada kompetensi watak kewarganegaraan. Hal tersebut berlanjut pada kurikulum Pendidikan kewarganegraan pada tahun 1975 dengan diperkenalkannya nomenklatur baru yaitu, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi pancasila sebagai mana yang diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) yang diberikan sebagai *General Education* di tingkat SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Proses pembelajaran PMP menggunakan pendekatan indioctriner dengan menanamkan nilai – nilai Pancasila dengan menghafal. Pendekatan tersebut terus berlanjut meskipun perubahan nomenklatur pada kurikulum 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) dengan masih sama berorientasi *value inculcation* dengan muatan nilai – nilai Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (Santoso, Al Muhtar, & Abdul Karim, 2015, p. 90).

Lahirnya paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan tak bisa dilepaskan seiring perubahan dinamika politik pasca reformasi 1998 pada kurikulum tahun 2004 berbasis kompetensi. Proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menggunakan asumsi bahwa siswa yang akan belajar pengetahuan dan keterampilan awal untuk menguasai pengetahuan tertentu (Wibowo & Wahono, 2017, p. 200). Mengusung semangat progresivisme, kurikulum 2004 mengang prinsip – prinsip sebagai berikut; 1) berorentasi pada pencapai hasil dan dampak (*outcome oriented*); 2) berbasis pada Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar; 3) bertolak pada kompetensi lulusan; 4) memperhatikan perinsip pengembangan kurikulum yang terdeferensiasi, (5) mengembangkan aspek pembelajaran secara utuh dan menyeluruh (holistik), (6) menerapkan perinsip ketuntasan belajar (*mastery learning*) (Budimansyah & Suryadi, 2008, p. 14).

Semangat paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan yang sebelumnya berorientasi pada guru (*teacher oriented*) menjadi berorientasi pada kebutuahn siswa (*student oriented*) berlanjut seiring penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Pada kurikulum KTSP tahun 2006 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan; 1) berfikir kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan anti korupsi; 3)



berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain; 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Budimansyah, 2010, p. 121).

Pada perubahan kurikulum 2013 berdampak pada kembalinya nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang semula pada kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 bernama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berubah pada kurikulum 2013 menjadi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn). Akan tetapi perubahan tersebut tidak merubah semangat progresivisme dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada partisipasi aktif dan bertanggung jawab warganegara melalui proses pendekatan pembelajaran saintifik.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa dinamika historis pedagogis berkembang kurikulum sesuai dengan kebutuhan zamannya. Perkembangan kurikulum menyesuaikan kebutuhan dan dinamika baik politik, sosiologis, maupun budaya. Seperti pada kurikulum 1962 sampai dengan 1994 yang bercorak pada pandangan filsafat parenialis dan idealis, hal tersebut dapat diamati dalam proses pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila yang indoktrinatif dengan menghafal Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dengan menggunakan pendekatan transmisi.

Perubahan pasca reformasi telah merubah sendi-sendi kehidupan sosial, politik dan ekonomi, hal tersebut tanpa terkecuali dalam pendidikan perubahan kurikulum pada tahun 2004, 2006 dan 2013 membawa semangat progresivisme. Dengan asumsi bahwa peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kompetensinya, pemangku kebijakan (*policy maker*), sekolah, dan guru hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi tumbuh dan kembangnya peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

D. Implikasi Filsafat Progresivisme Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai *General Education*

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Pendekatan pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus berorientasi pada kebermangfaatan yang dirasakan oleh peserta didik guna menghadapi tantangan yang kompleks pada masyarakat abad 21. Alih-alih ingin membentuk *good citizenship*, jangan sampai Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terjebak pada pembelajaran konservatif. Hasil penelitian (Mulyawan, 2005) memberikan ilustrasi bagaimana proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak berorientasi pada kebutuhan peserta didik, diantaranya sebagai berikut; 1) materi pendidikan kewarganegaraan yang berkecenderungan indoktrinatif; 2) mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang lebih cenderung militeristik dan secara paksa membentuk jiwa patriotik; 3) sumber referensi yang terbatas; 4) orientasi Pendidikan Kewarganegaraan banyak yang tidak relevan lagi dengan tuntutan demokrasi, HAM, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan masyarakat madani.

Setidaknya hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi guna menguatkan kembali semangat paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan yang progresif berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan warganegara. Semangat progresivisme seperti apa yang di jelaskan Dewey dalam (Jalaludin & Idi, 2012) filsafat progresivime hadir untuk mempersiapkan anak pada masa ini menuju masa depan yang belum jelas. Telah di pahami



bahwa era distrupsi membuat perubahan sosial, politik, teknologi begitu cepat. Bila tidak dipersiapkan, warganegara muda (*young citizen*) tidak akan mampu bersaing dalam kancah global.

Berdasarkan uraian diatas filsafat progresivisme berimplikasi Pada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *General Education* yang di berikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK, dan jenjang perguruan tinggi. Adapun Implikasinya sebagai berikut :

1. Filsafat progresivisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus berorientasi pada pengembangan materi yang mengakomodir tidak hanya ranah kognitif dan afektif akan tetapi mendorong penguatan psikomotorik sebagai ranah keterampilan warganegara (*civic skill*) yang perlu disiapkan dalam menghadapi tantangan abad 21.
2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pandangan filsafat progresivisme mempunyai peranan yang strategi. Peranan yang dimaksud guru Pendidikan Kewarganegaraan harus selalu memposisikan diri sebagai fasilitator serta inspirator yang memiliki keterbukaan berfikir (*open minded*), bersikap toleran, menghormati perbedaan, kreatif, inovatif dan inspiratif artinya guru Pendidikan Kewarganegaraan harus selalu mendorong para peserta didik untuk selalu berfikir maju (progresif), toleran, terbuka pada pemikiran pemikiran baru dan berorientasi pada hasil yang memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik dalam menghadapi kompleksitas masyarakat abad 21. Hal tersebut akan membuat proses pembelajaran terpusat dan berorientasi pada peserta didik (*student oriented*) dengan tujuan peserta didik mampu baik secara individual ataupun kelompok bersikap mandiri dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Sebut saja dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model *Project Citizen*, peserta didik dilatih berfikir kritis terhadap problematika yang sedang dihadapi dilingkungannya dengan menganalisis sekala prioritas, problem mana yang harus segera diselesaikan dengan keberanian dan kemerdekaan mengambil keputusan baik secara individu maupun kolektif berdasarkan pertimbangan *moral judgment* yang dimiliki. Galserfeld dalam (Pannen, 1991) menjelaskan dengan model *Project Citizen* peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya, yaitu mengemukakan kembali pengalamannya, memiliki kemampuan mengambil keputusan, dan memiliki kecenderungan menyukai pengalamannya.

Dengan demikian guru dalam proses pembelajaran dalam pandangan filsafat progresivisme dapat dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran jika keberhasilan itu didapat oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kebermanfaatan yang didapatkan baik secara individual maupun kelompok. Hasil dari proses pembelajaran ini, akan menghasilkan karakter peserta didik yang konstruktif, toleran terhadap perbedaan, menghargai orang lain dan santun dalam bersikap dan bertindak.

Keberhasilan diatas tidak akan diperoleh bilamana peran guru tidak dilandaskan akan tanggung jawab yang bersifat komprehensif terhadap tujuan-tujuan progresivisme. Sebab peran guru yakni mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, mengembangkan minat dan bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang di miliki peserta didik (Basri, 2012).



3. Kurikulum dalam pandangan filsafat progresivisme haruslah menitik beratkan pada cara-cara peningkatan kemampuan yang dimiliki peserta didik agar bisa *survive* dalam menghadapi persaingan global. Ma'ruf (2014) menjelaskan, kurikulum dalam pandangan filsafat progresivisme adalah sebagai pengalaman mendidik yang bersifat eksperimental dan adanya rencana dan susunan yang teratur.

Pada realitasnya kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia baik secara historis pedagogis maupun historis epistemologi mengalami perubahan dengan menyesuaikan perkembangan. Mulai dari penyesuaian nomenklatur sampai konten materi. Akan tetapi hal tersebut tidaklah boleh menafikan bahwa perkembangan zaman telah menuntut pada luaran yang dihasilkan, yakni bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan warganegara ideal, warga negara yang memiliki watak kewarganegaraan (Branson, 1999).

IV. Kesimpulan

Peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pembentuk karakter bangsa memberikan implikasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus berangkat dari akar serta nilai-nilai ke Indonesia, yakni Pancasila. Perjalanan kelam historis pedagogis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat penguasa untuk menterjemahkan pesan-pesan politik pragmatis tidaklah boleh terulang. Filsafat progresivisme hadir untuk mendobrak konservatisme, doktrinisme, dan otoritarianisme dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Filsafat progresivisme menekankan bahwa kebebasan dan pengembangan potensi peserta didik adalah hal yang prinsip guna memberikan kebermanfaatan dan kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Watak kewarganegaraan; *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), *Civic Skill* (Kecakapan Kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (Watak Warga negara) menjadi sebuah keniscayaan bilamana kurikulum dan guru Pendidikan Kewarganegaraan tidak beranjak dari prinsip – prinsip filsafat progresivisme.

Maka pandangan filsafat progresivisme berimplikasi pada; *pertama*, Materi Pendidikan Kewarganegaraan harus mendorong keterampilan warganegara (*civic skill*), *kedua*, guru senantiasa menjadi fasilitator, inspirator serta kreator dalam menciptakan lingkungan belajar yang toleran, menghargai perbedaan, mendorong tumbuh dan kembangnya potensi peserta didik, *ketiga* kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan hendaklah dipersiapkan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan peserta didik untuk bisa bersaing, baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Daftar Pustaka

- Barnadib, I. (2000). "Renungan Tentang Filsafat Dewasa Ini". Shindunata (ed). *Mengagas Paradigma Baru Pendidikan : Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta : Kanisius .
- Basri, H. (2012). *Kapita Selekta Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Branson, M. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.



- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn Dan Masyarakat Multikultural*. Bandung : Program Studi Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Budimansyah, D., & Winataputra, U. (2007). *Civic Education, Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.
- Dewey, J. (1950). *Democracy and Education, an Introduction to the Philosophy of Education*. USA: The Mcmillan Company.
- Dewey, J. (1963). *Freedom and Culture*. USA: Capricoon Book Edition.
- Ibrahim, R. (2018). Filsafat Progresivisme Perkembangan Peserta Didik. *Jurnal Ar- Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 151-166.
- Jalaludin, & Idi, A. (2012). *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat Dan Pendidikan*. . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kemendikbud. (2019). *Merdeka Belajar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Ma'ruf. (2014). Aliran Pendidikan Dalam Prespektif Progresivisme dan Esensialisme. *Jurnal Yudhatara* , 13-25.
- Majid. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013, Kajian Teoritis Dan Praktis*. Bnadung : Interes Media.
- Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, Method Sourcebook, Edition 3*. . USA : Sage.
- Muhmideyeli. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Bandung : Refika Aditama.
- Mulyawan, R. (2005). *Pendapat Mahasiswa UNPAD terhadap Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Laporan Penelitian)*. Bandung: LP – UNPAD.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pannen, P. (1991). *Konstruktivistik dalam pembelajaran*. Jakarta: Proyek Pengembangan Universitas Terbuka Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Salu, V. V., & Triyanto. (2017). Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Implikasinya Dalam Pendidikan Seni Di Indonesia . *Jurnal Imajinasi*. 11 (1), 29-42.
- Santoso, G., Al Muhtar, S., & Abdul Karim, A. (2015). Analisis SWOT Civic Education curriculum for senior high school year 1975 – 2013. *Civics : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. (19) 1, 86-109.
- Sardiman. (2003). *Interaksi dan Motivasi Belajar*. Jakarta: Jaya Grafindo Persada.
- Somantri, N. (1969). *Pelajaran Kewarga Negara di sekolah*. Bandung : IKIP Bandung.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan : Usaha untuk memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics*. 14 (2), 196-205 .



Winataputra, U. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam prespektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: gagasan, instrumentasi, dan praksis*. Bandung: Widya Aksara Press.

Winataputra, U. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Prespektif Internasional. *Jurnal ACTA Civicus*. 1 (1), 1-15.